

ANALISIS KEMAMPUAN DAERAH, TINGKAT KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2010-2014

oleh :

Riris Dwi Angraini

Universitas Negeri Surabaya

Email : ririsdwianggraini@gmail.com

ABSTRACT

The ability of local and regional financial performance is measured using the ratio of DOF (Degree of Fiscal Autonomy), the ratio of IKR (Capability Index Routine), self-sufficiency ratio, and the ratio of PAD effectiveness. Judging from Tangerang City local financial capacity is considered quite able to implement regional autonomy. Besides the government's financial performance showed positive results. Tangerang City Government capable of realizing revenue in accordance with the targets set, even able to exceed the target, with an average ratio of 120.32%, which can be said to be effective. While the measurement using the ratio of self-sufficiency has not shown good results. On average during the five years the level of independence of Tangerang City still stands at below 50%, which means that the level of dependence on the central government through balancing funds, and other legitimate income areas is still quite high. But with these numbers form a pattern of relationships which means the consultative role of the central government has begun to diminish albeit slightly and is considered capable enough to implement regional autonomy.

Keywords : *Ability Regions, Regions Financial Performance, DOF ratio (Degree of Fiscal Autonomy), IKR Ratio (Capability Index Routine), self-sufficiency ratio, ratio of PAD effectiveness.*

PENDAHULUAN

Terbentuknya otonomi daerah dimulai semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah . Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, dengan adanya otonomi daerah ini tentunya menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur pemerintahannya sendiri secara mandiri mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Hal ini dapat digunakan sebagai pendorong bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada daerahnya masing-masing dengan tujuan mengembangkan daerah pemerintahannya tersebut.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah anggaran daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD tersebut merupakan rancangan dana yang dibuat untuk satu periode tertentu yang nantinya akan dilaporkan dan dijadikan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan, serta sebagai sarana pertanggungjawaban pengelolaan dana oleh Pemerintah daerah. Maka dari itu diperlukan pengelolaan dana yang dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat mendorong pemerintah untuk lebih mandiri dalam mengurus keuangan pemerintahannya. Tingkat kemandirian pemerintah daerah/kota dan efektivitas dalam pengelolaan dana yang diperoleh tersebut dapat mencerminkan kinerja pemerintahannya.

Dalam pemerintahan daerah/kota, terutama mengenai pendanaan terkadang pemerintah daerah masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat serta dana pinjaman selain dari dana yang didapat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga mengatakan otonomi daerah di Indonesia belum terlaksana sepenuhnya. Dia

berujar, pemerintahan daerah tidak bisa mengelola wilayahnya seutuhnya tanpa campur tangan pihak lain. (Tempo.co – Jakarta). Padahal pada tahun 2012 salah satu pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah/Kota Tangerang mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi maupun Kota/kabupaten yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah (otda) terutama terkait dengan usaha untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Otda Kemendagri Djoehermansyah Djohan, Kota Tangerang mendapatkan penghargaan ini karena dinilai maju dalam pelayanan publik, pelayanan pemerintahan serta tingkat partisipasi masyarakat yang cukup baik. (Tangerangkota.go.id). Hal ini tentu berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait pelaksanaan otonomi daerah. Memang jika dilihat dari aspek non keuangan, Pemerintah Kota Tangerang dinilai baik dan berhak menerima penghargaan tersebut. Sedangkan jika dilihat dari aspek keuangan belum tau apakah kinerjanya sudah baik atau belum terutama untuk tingkat kemandirian pemerintahan, efektivitas dalam realisasi anggaran, dan kemampuan daerahnya. Padahal Menurut Munir dkk (2004) dalam Sijabat dkk (2014), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Berkaitan dengan apa yang telah dikatakan sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisis kinerja pemerintahan pemerintah daerah/kota Tangerang jika ditinjau dari kemampuan daerah, tingkat kemandirian dan efektivitas realisasi anggarannya. Untuk menilai dan menganalisis kemampuan daerah, tingkat kemandirian dan efektivitas realisasi anggaran Pemerintah

Daerah/Kota Tangerang digunakan alat analisis rasio kemampuan daerah (Rasio DOF (Derajat Otonomi Fiskal) dan rasio IKR (Indeks Kemampuan Rutin), rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas. Maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah “Bagaimana kemampuan daerah, tingkat kemandirian dan efektivitas realisasi anggaran Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2010-2014?”

KAJIAN TEORI

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari :
 1. Dana Bagi Hasil
 2. Dana Alokasi Umum
 3. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Menurut Munir dkk (2004) dalam Sijabat dkk (2014), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Mengukur kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal

(DOF) dan rasio indeks kemampuan rutin (IKR). Menurut Reksohadiprodo (2000) dalam Munir dkk (2004) dalam Sijabat dkk (2014) DOF dapat diukur dengan menghitung:

$$\text{DOF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Melalui perspektif pembiayaan daerah, kemampuan keuangan daerah tercermin dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR). Radianto (1997) dalam Munir dkk (2004) dalam Sijabat dkk (2014) mendefinisikan IKR adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya. IKR diketahui dengan menghitung:

$$\text{IKR} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Rutin}} \times 100 \%$$

Tolak ukur kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dalam skala interval DOF dan IKR yaitu:

Tabel Kategori Kemampuan Daerah

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan	IKR (%)
0,00 - 10,00	Sangat Kurang	0,00 - 10,00
10,01 – 20,00	Kurang	10,01 – 20,00
20,01 – 30,00	Sedang	20,01 – 30,00
30,01 – 40,00	Cukup	30,01 – 40,00
40,01 – 50,00	Baik	40,01 – 50,00
>50,01	Sangat baik	>50,01

Sumber : Munir dkk (2004) dalam Sijabat dkk (2014)

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Brown (1993) dalam Andayani (2007) dalam Sijabat dkk (2014), menyarankan untuk menggunakan analisa rasio keuangan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah. Beberapa analisis rasio dalam pengukuran kinerja keuangan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah PAD yang telah ditargetkan. Menurut Mahsun (2006) dalam Sijabat dkk (2014), rasio ini diukur melalui perbandingan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel Tingkat Efektivitas PAD

Efektivitas Keuangan Daerah	Rasio Efektivitas
Efektif	>100%
Efektif berimbang	=100%
Tidak Efektif	<100%

Sumber : Mahsun (2006) dalam Sijabat dkk (2014)

2. Rasio Kemandirian

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$RK = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Penilaian Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Purba, 2012 dalam Sijabat dkk (2014)

Semakin tingginya rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin kecil, dan demikian juga sebaliknya.

Berpatokan pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, empat pola yang diperkenalkan tentang hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan dengan tingkat kemandirian daerah yaitu: 1.) Pola hubungan *instruktif*, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. 2.) Pola hubungan *konsultatif*, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah. 3.) Pola hubungan *partisipatif*, yaitu peran Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. 4.) Pola hubungan *delegatif*, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. (Halim, 2002 dalam Nunu, 2011)

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis kemampuan daerah dan kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio DOF, rasio IKR, rasio kemandirian, dan rasio efektivitas PAD telah dilakukan beberapa peneliti, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Damanhuri (2013) tentang Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007-2011 menunjukkan bahwa berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, pola hubungan kemandirian daerah Pemerintah Kota di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 22,72%. Terkecuali pada Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki rasio rata-rata 56,56% (Pola Hubungan Partisipatif), bahkan pada tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya mencapai nilai rasio 100,75% (Pola Hubungan Delegatif).
2. Sijabat, dkk. (2014) tentang Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012) menunjukkan bahwa kemampuan keuangan kota malang mengalami kecendrungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata rasio DOF 13,67% dan IKR 18,01%. Kinerja keuangan kota malang dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecendrungan peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 16,43%, efektivitas PAD 107,7%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan SILPA setiap tahun semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan serta

kinerja keuangan kota Malang masih belum optimal sehingga perlu melakukan pembenahan lebih dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Malang.

3. Nunu (2011) tentang Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Morowali Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 s/d 2009 dapat di katakan rendah sekali, dimana rata-rata tingkat kemandiriannya hanya mampu mencapai 1,67%, angka tersebut tentu saja rendah sekali dan sangat jauh dari ketetapan standar kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Morowali terhadap Pemerintah Pusat atau Provinsi masih tergolong tinggi. Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Morowali dari Tahun 2007 s/d 2009 dikatakan belum efektif, dimana tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya rata-rata hanya mampu mencapai angka 53,07% atau $X < 100\%$. Sedangkan tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali dapat dikatakan memuaskan, nilai rata-rata tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menekan hingga 2,31% atau $X < 100\%$, dimana semakin kecil tingkat efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 100% menunjukkan semakin baik atau semakin efisien.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan daerah serta kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang diukur melalui perhitungan rasio keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2010-2014 dan disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis. Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang tahun 2010-2014. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2014 yang

diperoleh dari web resmi Dispenda Tangerang, yang kemudian diolah penulis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi yang berupa LRA Kota Tangerang tahun 2010-2014. Data yang telah dikumpulkan penulis kemudian diolah dan dianalisis menggunakan alat ukur berupa rasio kemampuan daerah (rasio DOF dan IKR), rasio kemandirian, dan rasio efektivitas.

Hasil dan Pembahasan

Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tangerang

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Tangerang dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang dalam mengumpulkan pendapatan asli daerahnya. Kemampuan keuangan daerah dapat diukur menggunakan rasio derajat otonomi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin. Dimana rasio DOF menunjukkan kemampuan daerah dalam menyumbang keuangan daerahnya melalui PAD, sedangkan rasio IKR menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai belanja rutin daerahnya dengan PAD.

Tabel Rasio DOF Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	% DOF	Kemampuan Keuangan
2010	Rp 350,295,783,693	Rp 1,634,236,485,836	21.43%	Sedang
2011	Rp 665,231,223,713	Rp 2,224,307,766,291	29.91%	Sedang
2012	Rp 689,427,609,063	Rp 2,504,685,440,151	27.53%	Sedang
2013	Rp 1,033,942,090,522	Rp 3,068,018,641,837	33.70%	Cukup
2014	Rp 1,603,073,637,614	Rp 3,725,132,012,062	43.03%	Baik
rata-rata	Rp 4,341,970,344,605	Rp 13,156,380,346,177	33.00%	Cukup

Sumber : tangerangkab.go.id, Diolah Penulis

Berdasarkan tabel diatas, rasio DOF kora Tangerang mulai tahun 2010-2014 rata-rata mengalami kenaikan tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2012 yang mengalami penurunan namun tidak signifikan. Dengan rasio rata-rata selama 5 tahun sebesar 33%, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang sudah cukup mampu dalam menyumbang pendapatan daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah yang selalu meningkat setiap tahunnya, sehingga total pendapatan daerah juga mengalami peningkatan setiap tahun. Seperti yang tercantum pada tabel, pada tahun 2010 PAD yang diperoleh sebesar Rp 350,295,783,693 dan pada tahun 2011 sebesar Rp 665,231,223,713. Pada tahun 2011 PAD Kota Tangerang mengalami peningkatan sekitar 50% dibandingkan dengan tahun 2010. Sedangkan total pendapatan daerah pada tahun 2010 sebesar Rp 1,634,236,485,836 dan pada tahun 2011 menjadi Rp 2,224,307,766,291 dengan peningkatan sekitar 70%, dan seterusnya. Hal tersebut membuktikan bahwa peningkatan PAD Kota Tangerang cukup mampu untuk andil dalam menyumbang total pendapatan daerah Pemerintah Kota Tangerang.

Tabel Rasio IKR Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	PAD	Total Belanja Rutin	% IKR	Indeks Kemampuan Rutin
2010	Rp 350,295,783,693	Rp 1,783,247,996,252	19.64%	Kurang
2011	Rp 665,231,223,713	Rp 2,027,969,740,162	32.80%	Cukup
2012	Rp 689,427,609,063	Rp 2,556,468,593,529	26.97%	Sedang
2013	Rp 1,033,942,090,522	Rp 2,871,204,505,672	36.01%	Cukup
2014	Rp 1,603,073,637,614	Rp 3,512,771,524,674	45.64%	Baik
rata-rata	Rp 4,341,970,344,605	Rp 12,751,662,360,289	34.05%	Cukup

Sumber : tangerangkab.go.id, Diolah Penulis

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah jika ditinjau dari kemampuannya dalam membiayai belanja rutinnya, diukur menggunakan rasio IKR. Selama 5 tahun berturut-turut rasio IKR Kota Tangerang cenderung mengalami kenaikan, terkecuali pada tahun 2012 yang mengalami penurunan. Dengan rasio rata-rata sebesar 34,05% Kota Tangerang dapat dikatakan cukup mampu dalam membiayai belanja rutinnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari total penerimaan PAD yang jauh lebih sedikit dibandingkan dana yang dikeluarkan untuk belanja rutin pemerintahannya. Pada tahun 2010 PAD yang diperoleh sebesar Rp 350,295,783,693 sedangkan total belanja yang dikeluarkan pemerintahan pada tahun yang sama sebesar Rp 1,783,247,996,252. Begitu pula pada tahun 2011, penerimaan PAD sebesar Rp 665,231,223,713 sedangkan pengeluaran belanja rutinnya sebesar Rp 2,027,969,740,162. Hingga 2014 perolehan PAD selalu meningkat, tetapi bukan berarti dapat menutupi biaya belanja rutin pemerintah dikarenakan biaya belanja rutin pemerintah juga semakin meningkat tiap tahunnya. Itu berarti untuk membiayai belanja rutin, Pemerintah Kota Tangerang masih memerlukan bantuan dana dari pihak lain, karena jumlah penerimaan PAD lebih sedikit dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk belanja rutin pemerintahan.

Namun secara keseluruhan, kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tangerang dinilai cukup mampu untuk menjalankan pemerintahan sebagai daerah otonom, karena angka kemampuan daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mulai dari kurang mampu, sedang, cukup, hingga baik.

Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tangerang

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai Pemda Kota Tangerang dalam bidang keuangan yang dipertanggungjawabkan melalui Laporan

Realisasi APBD. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat diukur menggunakan rasio efektifitas PAD dimana rasio ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Tangerang dalam merealisasikan anggaran sesuai target yang dikehendaki, dan juga menggunakan rasio kemandirian daerah yang mana rasio ini akan menunjukkan seberapa mandiri Pemerintah Kota Tangerang untuk membiayai pemerintahannya, ditinjau dari besarnya dana bantuan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi lain dan pinjaman.

Tabel Rasio Efektivitas PAD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	% Efektivitas	Tingkat Efektivitas
2010	Rp 350,295,783,693	Rp 295,930,495,481	118.37%	Efektif
2011	Rp 665,231,223,713	Rp 448,064,721,762	148.47%	Efektif
2012	Rp 689,427,609,063	Rp 609,800,379,845	113.06%	Efektif
2013	Rp 1,033,942,090,522	Rp 882,788,661,937	117.12%	Efektif
2014	Rp 1,603,073,637,614	Rp 1,372,016,959,714	116.84%	Efektif
rata-rata	Rp 4,341,970,344,605	Rp 3,608,601,218,739	120.32%	Efektif

Sumber : tangerangkab.go.id, Diolah Penulis

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Tangerang jika ditinjau dari kemampuan untuk merealisasikan PAD dari apa yang telah ditargetkan menunjukkan hasil yang memuaskan. Karena selama 5 tahun berturut-turut rasio efektifitas lebih dari 100 %, dengan rata-rata rasio sebesar 120,32%. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang efektif dan artinya Pemerintah Kota Tangerang telah mampu merealisasikan PAD sesuai apa yang telah ditargetkan, bahkan dapat melebihi target. Peningkatan perolehan PAD ini juga didukung dengan perolehan hasil pajak daerah yang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tangerang, hasil pajak daerah pada tahun 2010 sebesar Rp

117.198.221.318, tahun 2011 sebesar Rp 426.863.508.462, tahun 2012 sebesar Rp 535.855.875.314, tahun 2013 sebesar Rp 803.097.821.528, dan tahun 2014 sebesar Rp 1.015.716.405.755. Hal tersebut juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Tangerang, mengingat pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dari PAD.

Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	PAD	Bantuan Pempus atau pemprov lain dan pinjaman	% Kemandirian	Tingkat Kemandirian
2010	Rp 350,295,783,693	Rp 1,283,940,702,143	27.28%	Rendah
2011	Rp 665,231,223,713	Rp 1,559,076,542,578	42.67%	Rendah
2012	Rp 689,427,609,063	Rp 1,815,257,831,088	37.98%	Rendah
2013	Rp 1,033,942,090,522	Rp 2,034,076,551,315	50.83%	Sedang
2014	Rp 1,603,073,637,614	Rp 2,122,058,374,448	75.54%	Tinggi
rata-rata	Rp 4,341,970,344,605	Rp 8,814,410,001,572	49.26%	Rendah

Sumber : tangerangkab.go.id, Diolah Penulis

Tahun 2010-2014 rasio kemandirian Pemerintah Kota Tangerang, menunjukkan persentase yang fluktuatif. Pada tahun 2010-2012 prosentase tingkat kemandirian Pemerintah Kota Tangerang berada pada kisaran 27,28% - 42,67% yang berarti bahwa tingkat kemandiriannya masih rendah. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 50,83% dengan tingkat kemandirian sedang. Dan pada 2014 tingkat kemandirian berada pada angka 75.54% dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Tetapi rasio rata-rata selama 5 tahun masih menunjukkan tingkat kemandirian yang rendah dengan pola hubungan konsultatif yang artinya campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah. Meskipun PAD selama 5 tahun berturut-turut mengalami kenaikan yang cukup

signifikan, tidak menjadikan Pemerintah Kota Tangerang tidak bergantung pada Pemerintah Pusat, melihat bantuan dari pemerintah pusat dan lainnya juga terus meningkat selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini juga didukung dari perhitungan rasio indeks kemampuan rutin (IKR) yang masih dalam kategori cukup dan belum mampu membiayai pemerintahannya secara mandiri sepenuhnya, sehingga masih ada dana bantuan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

Simpulan dan Saran

Ditinjau dari kemampuan keuangan daerah yang diukur dengan rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dan rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR), Pemerintah Kota Tangerang dinilai cukup mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Selain itu kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio efektivitas PAD menunjukkan hasil positif. Pemerintah Kota Tangerang mampu merealisasikan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan bahkan mampu melebihi target, dengan rasio rata-rata 120,32% yang dapat dikatakan efektif. Sementara itu pengukuran menggunakan rasio kemandirian belum menunjukkan hasil yang baik. Secara rata-rata selama 5 tahun tingkat kemandirian Kota Tangerang masih berada pada angka dibawah 50%, artinya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih cukup tinggi. Tetapi dengan angka tersebut membentuk pola hubungan konsultatif yang artinya peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang meskipun sedikit dan dianggap cukup mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.

Karena tingkat kemandirian yang masih dalam kategori rendah, sebaiknya Pemerintah Kota Tangerang lebih menggali lagi sumber daya-sumber daya yang berpotensi untuk meningkatkan PAD agar tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Sijabat, Saleh, Wachid. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- Puspitasari, Ayu Febriyanti. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Damanhuri, Zulkifly Prabowo. 2013. *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2007-2011*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Fidelius. 2013. *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado
- Nunu, Arson Abd. Rasyid. 2011. *Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Morowali*. Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- <http://tangerangkota.go.id/pemkot-tangerang-dianggap-berhasil-terapkan-otonomi-daerah> (Diakses pada 9 Juni 2015)
- <http://metro.tempo.co/read/news/2015/04/27/231661185/sindir-otonomi-daerah-ahok-kepala-dilepas-ekor-dipegang> (Diakses pada 9 Juni 2015)
- <http://tangerangkab.go.id/rencana-laporan-realisis/> (Diakses pada 9 Juni 2015)
- <http://otda.kemendagri.go.id/index.php/70-ditjen-otda/produk-hukum/permendagri/1719-permendagri-nomor-73-tahun-2009> (Diakses pada 13 Juni 2015)